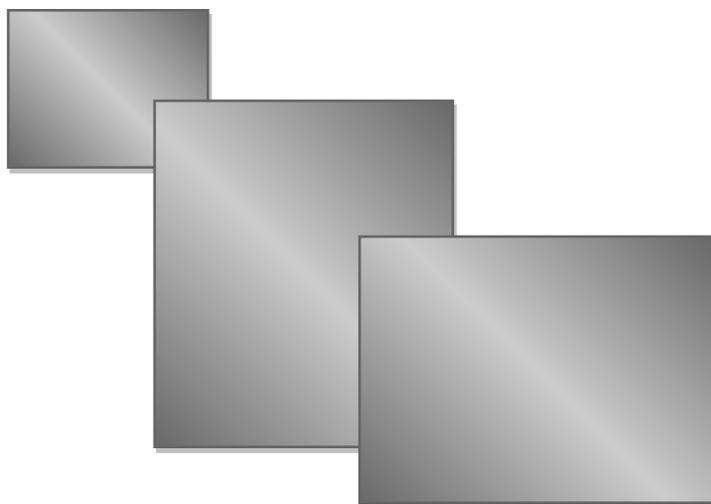




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN ANGGARAN 2017 S/D 2022



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BESAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022.

RENSTRA ini disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih banyak kekurangan. Untuk itu saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Renstra ini

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Besar



Drs. SULAIMI, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 197407231993111002

DAFTAR ISI

	Halama
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN	6
ACEH BESAR	
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar	6
2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar	7
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar	7
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar	8
BAB III PERMASALAHAN ISU - ISU STRATEGIS	9
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan KPTSP Kabupaten Aceh Besar	9
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	9
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	15
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup strategis	16
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	16

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	17
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP	18
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	19
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	20
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	21
BAB VIII PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut dan amanat Undang undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap SKPD wajib menyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).

Pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan.

Dokumen rencana pembangunan disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Setelah Kepala Daerah Terpilih dilantik untuk masa jabatan Tahun 2017-2022 maka Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya menyusun visi, misi dan program pembangunan selama 5 tahun yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah dokumen perencanaan Jangka Menengah (RPJMD).

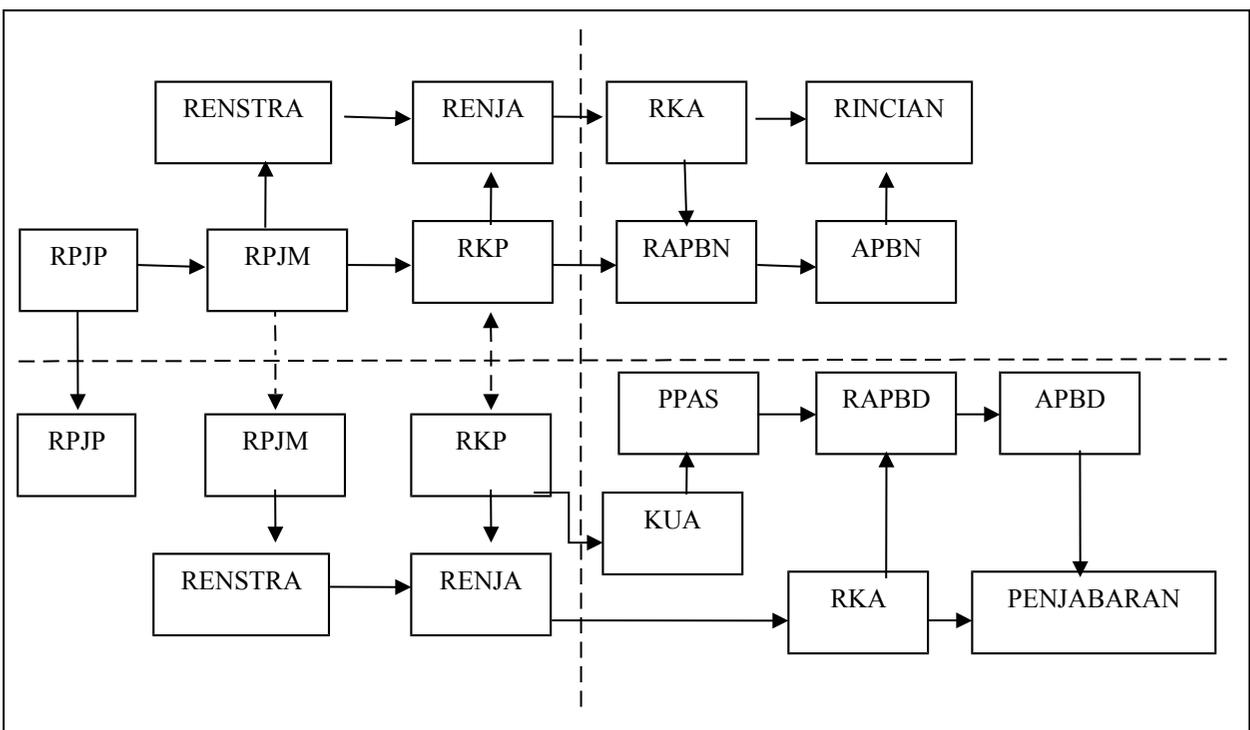
Dalam pasal 151 Undang – Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar disusun sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas didalam RPJMD Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 – 2022 Adapun RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022 memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Selanjutnya hubungan dokumen Renstra terhadap dokumen rencana lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Perencanaan Program Penganggaran

Dengan RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program-program pemerintah pusat sehingga RPJMD tetap dalam kerangka Kabupaten Aceh Besar sebagai bagian dari NKRI.

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah.

Setelah RKPD ditetapkan, maka kepala SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Renstra SKPD untuk jangka waktu satu tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang dilaksanakan oleh Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
 16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
 17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
 18. Peraturan Bupati Aceh Besar No.18 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar merupakan dokumen strategis 5 (lima) tahun Tahun 2017-2022 sebagai bagian dari sistem RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022.

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022, dimaksudkan sebagai pedoman dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan kewenangan dibidang penanaman modal dan perizinan terpadu

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar bertujuan untuk memperoleh pedoman sebagai pegangan untuk Menciptakan system pemerintahan yang efektif, efisien, professional, transparan dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan masyarakat disemua tingkatan pemerintahan.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 disusun kedalam 8 (delapan) Bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan,, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar tahun 2017-2022. berikut pendanaan indikatif .

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN ACEH BESAR

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertugas membantu Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan yang sesuai dengan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Aceh Besar ditetapkan berdasarkan Qanun

Kabupaten Aceh Besar Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar mempunyai tugas umum :

- 1) Pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu melalui satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar mempunyai fungsi:
 - a. Menyusunan dan merumuskan rencana program dan kegiatan.
 - b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - d. Mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan terpadu di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan / non perizinan.
 - e. Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan promosi kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - f. Melaksanakan fasilitas kerjasama di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Qanum Nomor 18 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Penanaman Modal
4. Bidang Pelayanan Perizinan
5. Bidang Data, Pengaduan dan Pengkajian

2.2 SUMBER DAYA SKPD

Dalam rangka menjalankan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar didukung oleh Personil dan Sarana/Prasarana atau perlengkapan yang berpengaruh langsung terhadap kelangsungan Organisasi yaitu :

A. Susunan Kepegawaian

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselon Jabatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
 - b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

No	Jabatan	Jml	Pangkat/Gol/Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Jml	Ke t
1	Kepala Dinas	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina Tk.I (IV/b)	1	S2	1	

3	Kabid	3	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S1	1	
			Pembina (IV/a)	1	S2	1	
			Penata Tk.I (III/d)	1	S2	1	
4	Kasi	9	Penata Tk.I (III/d)	1	S1	1	
			Penata (III/c)	4	S1	4	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	2	S1	2	
5	Kasubag	2	Penata Tk.I (III/d)	1	S1	1	
			Penata (III/c)	1	S1	1	
6	Fungsional Umum	10	Pembina Tk. I (IV/b)	2	S1	2	
			Penata Tk.I (III/b)	1	S1	1	
			Penata (III/c)	1	S1	1	
			Penata Muda (III/a)	4	S1	4	
			Pengatur (II/c)	3	SMA	3	
7	Tenaga Honorer	2	-	-	S1	2	
		4	-	-	SMA	4	
		2	-	-	DIII	2	
TOTAL						34	

B. Sarana dan Prasarana/Perlengkapan

Perkembangan Sarana dan Prasarana/ Perlengkapan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah
1	2	3	4

1	Minibus	Toyota Avanza	1
2	Double Cabin	Mitsubishi Strada	1
3	Sepeda Motor	Honda	5
4	Mobil Layanan Perizinan	Isuzu	1
5	GPS	Garmin montana 650	1
6	Rak Besi	Besi/kaca	1
7	Band Kas	Besi	1
8	Mesin Fotocopy	Fuji Xerox	2
9	Mesin Absensi	Solution X105	2
10	CCTV		1
11	Proyektor+Attachment		1
12	Infocus	HP	1
13	Layar Infokus		1
14	Bangku Tunggu	Besi/Busa	8
15	Meja ½ Biro	M2B	10
16	Kursi Besi/metal	Chitose	20
17	Sofa	Modis	2
18	Pintu Kaca	Tempahan	1
19	Meja Rapat	Tempahan	1
20	Meja Kerja Kayu	Tempahan	2
21	Mesin Potong Rumput	FR300	1
22	AC	LG,Sharp, Panasonic,aux	15
23	Televisi	LG	3
24	Gorden	Kain	4
25	Meja Kerja Eselon III	Informa,tempahan	7
26	Meja kerja pegawai non struktural	Tempahan	4
27	Kursi Kerja pegawai non struktur	Tempahan	41
28	Kursi kerja eselon IV	Kulit	12
29	Lemari Arsip	Tempahan	15
30	UPS	Besi	9
31	Camera Digital	ICA SIN 2100 C	3
32	Faximili	Sony	2
		Panasonic	2

33	Generator Set	-	2
34	Komputer	Acer, Hp	23
35	Note Book	Hp	5
36	Printer/printer dot matrik	Epson,Brother MFC	13
	Bangunan Gedung	kayu	2
37	Mushalla		1

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar Dalam rangka melaksanakan kinerja pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan (SP) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Keberhasilan yang di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar berdasarkan sasaran/terget Renstra priode 2012–2017 melalui program utama sebagai berikut :

1. Program Pelayanan dan perizinan usaha

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan permohonan perizinan yang telah dilakukan tahap pemrosesan izin terhadap izin usaha yang telah memiliki kelengkapan bahan administrasi untuk di lakukan survey lapangan.
- Target Pendapatan Realisasi Daerah yang telah direalisasikan dari tahun 2012 s.d 2017 sebagaimana tertera pada table di lampiran

- Rekapitulasi Izin yang diterbitkan dari Tahun 2012 s/d 2017 sbb :

NO	Tahun 2012 s.d. 2017	Jumlah Izin
1	2012	3.740
2	2013	3.146
3	2014	4.146
4	2015	4.034
5	2016	3.738
6	2017	3.174

Adapun rincian jumlah izin berdasarkan jenis izin sebagaimana tertera pada lampiran. Retribusi perizinan tertentu memiliki target setiap tahunnya mencapai hasil yang optimal yang terdiri dari :

- 1.1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan capaian 100%
- 1.2 Retribusi Izin Gangguan capaian 100%
- 1.3 Retribusi Izin Reklame capaian 100%

2. Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu

Kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan dilaksanakan untuk memberi pemahaman mengenai perizinan terhadap masyarakat, pelaku usaha dan Aparatur Sipil Negara, sosialisasi ini dilaksanakan tahun 2013, 2014 dan tahun 2017.

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP pada tahun 2017 telah terealisasinya 1 unit Mobil Izin keliling yang diharapkan dengan adanya mobil izin keliling ini dapat membantu masyarakat yang berada di daerah / kecamatan yang jauh dengan kantor pusat DPMPTSP Kota Jantho dalam melakukan pengurusan izin, dan juga dengan adanya mobil izin keliling dapat menambah Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah (PAD). Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel T-C.24.

- Penghargaan /Prestasi yang telah dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2012 s.d 2017.
- a. Piagam Penghargaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Peringkat ke-2 oleh Gubernur Aceh, pada tanggal 11 Juni 2012;
 - b. Investment Award, Nominasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2012 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tanggal 12 November 2012;

- c. Aceh Investment Award, Nominee Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten / Kota peringkat ke V tanggal 13 November 2017 oleh Gubernur Aceh;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar

Peluang terhadap pengembangan DPMPTSP ke depan terkait dengan tertariknya investor dalam pengembangan usaha di Kabupaten Aceh Besar maka akan dibutuhkan pelayanan terpadu, terintegrasi dan sinkronisasi demi kepastian investasi. Sedangkan tantangan yang di hadapi belum ada regulasi yang menjamin kepastian investasi dan SDM pengelola. Adapun tantangan dan peluang DPMPTSP sebagai berikut:

1. Tantangan :

- Masih kurangnya informasi mengenai potensi daerah terhadap investor
- Belum optimal penyelenggaraan pelayanan penanaman modal/perizinan
- Masih kurangnya SDM khusus pengembangan pelayanan penanaman modal/perizinan
- Kurangnya dukungan public dalam pengembangan layanan penanaman Modal/perizinan
- Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dalam Kabupaten Aceh Besar

2. Peluang :

- Dengan adanya investor dapat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan pelayanan penanaman Modal/perizinan
- Banyaknya pengajuan izin penanaman modal dari masyarakat / calon investor
- Berkembangnya dinamika usaha / industri dari masyarakat calon investor.

- Adanya Keputusan Bupati Aceh Besar tentang pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 Tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan secara terpadu melalui satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi keamanan dan kepastian. Adapun permasalahan – permasalahan mendasar, yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

1. Potensi Pendapatan asli daerah belum tergali secara optimal;
2. Penguatan Investasi Daerah belum optimal;
3. Kualitas Sumber Daya manusia masih rendah;

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 s/d 2022.

“ Terwujudnya Aceh Besar Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam “

2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 s/d 2022.

- a. Pelaksanaan Syariat Islam
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
- e. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis mukim dan gampong
- f. Percepatan laju pembangunan masyarakat pesisir, terisolir dan tertinggal

Untuk mencapai Visi dan Misi Bupati Aceh Besar Periode 2017-2022, maka ditetapkan Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.

3.2.1 Program Bupati/Wakil Bupati Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government), Bersih (Clean Government) dan Bertanggung Jawab.

Merupakan upaya menciptakan system pemerintahan yang efektif, efisien, professional, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan masyarakat di semua tingkatan Pemerintahan. Program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang sesuai dengan Program Bupati/Wakil Bupati sebagai Berikut :

- a) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :Implementasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
(capacity Building)
- b) Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu
Kegiatan : Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu
- c) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Kegiatan : Penyediaan Media Informasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
- d) Program Peningkatan Pelayanan dan Perizinan Usaha
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Perizinan (Survey lapangan dan perizinan keliling)
- e) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kegiatan : Penyusunan kebijakan Investasi bagi Pembangunan fasilitas dan infrastruktur (RUPM)
- f) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi (expo) luar daerah

Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi (expo) dalam daerah

3.3. Telaahan Renstra Kelembagaan / Renstra

Adapun factor penghambat atau permasalahan yang muncul pada saat ini di tinjau dari Renstra adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang terampil dan professional
2. Mengembangkan daya saing investasi dan potensi daerah terhadap ekonomi daerah
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang professional dan berorientas

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar telah disahkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032. Kawasan Strategi Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi :

1. KSK Kawasan Perkotaan sekitar Kota Banda Aceh meliputi :Kec. Lhoknga, Kec. Peukan Bada, Kec, Darul Imarah, Kec, Darul Kamal, Kec.Ingin Jaya, Kec, Krueng Barona Jaya, Kec, Blang Bintang, Kec, Kuta Baro, Kec, Darussalam, Kec, Baitussalam, Kec, Masjid Raya;
2. KSK Kawasan Koridor Perkotaan Lambaro – Sibreh;
3. KSK Agrowisata Saree;
4. KSK Agropolitan Indrapuri meliputi Kec. Seulimuem, Kec. Kuta Malaka, Kec. Kuta Cot Glie, Kawasana Jalin Kec.Kota Jantho, Kec. Montasik dan Kec. Lembah Seulawah;
5. KSK Minapolitan Perikanan Laut Baitussalam- masjid raya meliputi Kec, Baitussalam, Kec. Masjid Raya, Kec.Peukan Bada,Kec. Pulo Aceh, Kec. Leupung, Kec.Lhoknga
6. KSK Minopolitan Perikanan Darat Kota Jantho meliputi Kec, Seulimuem, Kec. Kuta Cotglie, Kec.Lembah Seulawah, Kec.Kuta Malaka, Kec. Montasik, Kec. Kota Jantho, Kec. Indrapuri dan Kec. Leupung;

7. KSK Pembangunan Kota Baru Pemerintahan meliputi Kec, Kuta Malaka seluas 300 ha;
8. Kawasan Terminal Tipe B di Gampong Suka Mulia Kec. Lembah Seulawah menjadinRest

Adapun faktor penghambat di tinjau dari RTRW dan Kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing
- b. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung pencapaian investasi
- c. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis sumber daya local dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

3.5. Penentuan Isu - isu Strategis

1. Belum optimal penggalian potensi investasi dan informasi;
2. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
3. Belum optimalnya promosi potensi penanaman modal;
5. Pelayanan public yang harus dioptimalkan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan monitoring perizinan;
7. Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan;
8. Belum Optimalnya pelaksanaan izin secara online;
9. Belum optimalnya pengkajian tentang regulasi terkait pelayanan perizinan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

▪ **TUJUAN**

1. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi;
2. Meningkatkan pelayanan perizinan Publik;

Sasaran adalah hasil nyata yang akan dicapai secara spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

▪ **SASARAN**

1. Meningkatnya Daya Saing Dan Iklim Investasi;
2. Meningkatnya Informasi dan Pelayanan Perizinan;

Sasaran adalah hasil nyata yang akan dicapai secara spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD beserta Indikator Kinerja untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada **tabel T.C.25**.
(Lampiran)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Dalam rencana Strategis dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam lima tahun mendatang dapat kita lihat pada Tabel T.C 26

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar dapat kita lihat pada T.C.27 di bawah ini;

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian strategi 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dapat dijabarkan pada T.C 28 dibawah ini.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 -2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar dengan didukung oleh seluruh pihak terkait serta sebagai pedoman untuk evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun kedepan.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Besar



Drs. SULAIMI, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 197407231993111002

T.C. 23
PENCAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN ACEH BESAR

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET Indikaor lainnya	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RATIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%																
	- Tersedianya biaya rekening telepon, listrik air				98%	99%	100%	100%	100%	88%	98%	98%	99%	87%	89,79%	97,02%	98%	99%	87%
	- Tersedianya bahan perlengkapan kebersihan kantor				78%	98%	100%	100%	100%	80%	95%	100%	85%	98%	62,4%	93,1%	100%	100%	100%
	- Tersedianya Alat Tulis Kantor				90%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	91,59%	99,01%	89,65%	100%	98%	91,59%	99,01%	89,65%
	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				95%	100%	100%	100%	100%	95%	99,11%	99,25%	100%	95,58%	95%	99,11%	99,25%	100%	95,58%
	- Tersedianya alat listrik dan elektronik				80%	95%	90%	85%	98%	80%	95%	90%	85%	98%	80%	95%	90%	85%	98%
	- Terpenuhinya perlengkapan kantor dan meubeleir				95%	85%	-	-	95%	95%	85%	-	-	95%	95%	85%	-	-	95%
	- Tersedianya media informasi				89%	98%	99%	100%	100%	89%	98%	99%	100%	100%	89%	98%	99%	100%	100%
	- Tersedianya anggaran makan minum pegawai				89%	98%	99%	100%	100%	89%	98%	99%	100%	100%	89%	98%	99%	100%	100%
	- Tersedianya anggaran perjalanan dinas				95%	85%	100%	100%	100%	95%	85%	100%	100%	100%	95%	85%	100%	100%	100%
	- Tersedianya honorarium pegawai kontrak				85%	95%	99%	100%	100%	85%	95%	99%	100%	100%	85%	95%	99%	100%	100%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur																		
	- Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung				85%	-	-	-	100%	82,12%	-	-	-	95,45%	82,12%	-	-	-	95,45%
	- Tersedianya pemeliharaan mobil jabatan				80%	90%	100%	100%	100%	78,12%	85,12%	100%	100%	100%	78,12%	85,12%	100%	100%	100%
	- Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional				80%	90%	100%	100%	100%	80%	90%	100%	100%	100%	80%	90%	100%	100%	100%
	- Tersedianya pemeliharaan alat - alat kantor				80%	90%	80%	85%	100%	78,12%	99,12%	85,02%	77,02%	99,23%	78,12%	99,12%	85,02%	77,02%	99,23%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
	- Tersedianya pakaian dinas pegawai				100%	-	100%	-	100%	99,12%	-	90,77%	-	100%	99,12%	-	90,77%	-	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
	- Implementasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				89%	-	-	-	99%	78,99%	-	-	-	88,29%	78,99%	-	-	-	88,29%
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan																		

	Capaian Kinerja dan Keuangan																		
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				-	77%	-	80%	90%	-	77%	-	80%	90%	-	77%	-	80%	90%
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																		
	- Penyediaan media informasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar				90%	-	100%	100%	-	89,02%	-	98,03%	97,34%	-	89,02%	-	98,03%	97,34%	-
7	Program Peningkatan Pelayanan Dan Perizinan Usaha																		
	- Monitoring dan Evaluasi Perizinan				98%	99%	100%	100%	100%	98%	99%	100%	100%	100%	98%	99%	100%	100%	100%
8	Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu																		
	- Soialisasi Pelayanan Prizinan Terpadu				100%	-	100%	-	100%	88,12%	-	98,05%	-	99,17%	88,12%	-	98,05%	-	99,17%

T.C. 24
ANGGARAN DAN REALISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN ACEH BESAR

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,069,555,816	1,129,337,803	1,311,074,705	1,483,950,575	1,376,870,015	858,083,756	1,036,940,975	1,162,016,885	1,346,400,246	1,120,474,572	80%	92%	89%	91%	81%		
BELANJA LANGSUNG	1,004,954,000	1,028,145,000	1,083,562,500	2,594,835,075	1,118,188,500	990,901,312	1,013,310,635	988,073,944	2,368,111,806	1,064,090,239	99%	99%	91%	91%	95%		
BELANJA PEGAWAI	297,800,000	325,400,000	153,900,000	1,483,950,575	162,700,000	296,350,000	324,500,000	46,600,000	1,346,400,246	158,800,000	100%	100%	30%	91%	98%		
BELANJA BARANG DAN JASA	558,254,000	609,245,000	94,500,000	598,084,500	572,588,500	550,691,312	595,408,635	94,500,000	513,854,560	523,440,239	99%	98%	100%	86%	91%		
BELANJA MODAL	148,900,000	93,500,000	835,162,500	512,800,000	382,900,000	143,860,000	93,402,000	746,973,944	507,857,000	381,850,000	97%	100%	89%	99%	100%		
JUMLAH	2,074,509,816	2,157,482,803	2,394,637,205	4,078,785,650	2,495,058,515	#####	2,050,251,610	2,150,090,829	3,714,512,052	2,184,564,811	89%	95%	90%	91%	88%		

T- C 25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	IDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARANPADA				
				TAHUN KE-				
1	2	3	4	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Daya Saing dan Iklim Investasi	Meningkatnya Daya Saing dan Iklim Investasi	- Jumlah Investor PMDN	40	42	44	45	47
			- Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rp.24.000.000.000.	Rp.25.000.000.000.	Rp.26.000.000.000.	Rp.27.000.000.000.	Rp.28.000.000.000.
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Publik	Meningkatnya Informasi dan Pelayanan Perizinan	Persentase Indek Kepuasan Masyarakat	83%	85%	87%	89%	90%
			Jumlah Permohonan Izin yang diproses	3,000	3,150	3,200	3,250	3,300

T-C 26

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

<p>VISI : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik Yang Mudah, Cepat dan Transparant Guna Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif</p> <p>MISI : Meningkatkan Iklim Investasi Yang Nyaman Bagi Dunia Usaha Sesuai Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Publik Yang Mudah, Cepat, Transparant dan Pasti. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan dan Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Berkualitas, dan Memiliki Integritas Yang Tinggi</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan Daya Saing dan Iklim Investasi	Meningkatnya Daya Saing dan Iklim Investasi	- Meningkatkan peluang investasi bagi pelaku usaha	- Penyusunan profil potensi investasi dan dokumen RUPM
		- Meningkatkan Promosi Investasi untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri	- Pameran dan Expo guna peyerbaluasan informasi potensi investasi daerah
		- Fasilitasi kerjasama usaha kecil, besar dengan usaha kecil menengah	- Kerjasama dan sosialisasi peraturan perizinan dan penanaman modal
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Publik	Meningkatnya Informasi Pelayanan Perizinan	- Optimalisasi kinerja aparaturnya pelayanan perizinan	- Pelaksanaan Bimtek bagi aparaturnya pelayanan perizinan dan penanaman modal
		- Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan perizinan	- Penyediaan sarana prasarana kantor dan media informasipendukung perizinan
		- Pengkajian Regulasi terkait Pelayanan Perizinan	- Penyusunan SOP Perizinan dan Penanaman Modal
		- Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi	- Pelaksanaan monev dan pendataan
		- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perizinan	- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat terkait proses penyusunan perizinan
		- Memantapkan penanganan pengaduan masyarakat	- Pemantapan penanganan pengaduan masyarakat

T.C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN ACEH BESAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Pelayanan Perizinan Publik	Meningkatnya Informasi dan Pelayanan Perizinan	2.12.2.12.1.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%											100%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Aceh Besar
			Kegiatan				1,057,617,400		1,163,379,140		1,279,717,054		1,407,688,759		1,548,457,635			
		2.12.2.12.1.1.2.	- Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi,air dan listrik		1 thn	103,224,000	1 thn	113,546,400	1 thn	124,901,040	1 thn	137,391,144	1 thn	151,130,258			
		2.12.2.12.1.1.06.	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaandinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas dan operasional		1 thn	48,300,000	1 thn	53,130,000	1 thn	58,443,000	1 thn	64,287,300	1 thn	70,716,030			
		2.12.2.12.1.1.08.	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		1 thn	6,000,000	1 thn	6,600,000	1 thn	7,260,000	1 thn	7,986,000	1 thn	8,784,600			
		2.12.2.12.1.1.10.	- Penyediaan ATK	Tersedianya ATK Kantor		atk	57,263,400	atk	62,989,740	atk	69,288,714	atk	76,217,585	atk	83,839,344			
		2.12.2.12.1.1.11.	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor		1 thn	130,000,000	1 thn	143,000,000	1 thn	157,300,000	1 thn	173,030,000	1 thn	190,333,000			
		2.12.2.12.1.1.12.	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya alat listrik dan		alat listrik	24,000,0	alat listrik	26,400,00	alat listrik	29,040,00	alat listrik	31,944,0	alat listrik	35,138,4			

			bangunan gedung	elektronik		00		0		0		00		00				
		2.12.2.12.1 .1.13.	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 thn	90,000,000	1 thn	99,000,000	1 thn	108,900,000	1 thn	119,790,000	1 thn	131,769,000			
		2.12.2.12.1 .1.15.	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan		1 thn	2,400,000	1 thn	2,640,000	1 thn	2,904,000	1 thn	3,194,400	1 thn	3,513,840			
		2.12.2.12.1 .1.17.	- Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum karyawan kantor		1 thn	150,580,000	1 thn	165,638,000	1 thn	182,201,800	1 thn	200,421,980	1 thn	220,464,178			
		2.12.2.12.1 .1.18.	- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tugas - tugas Kedinasan		1 thn	264,950,000	1 thn	291,445,000	1 thn	320,589,500	1 thn	352,648,450	1 thn	387,913,295			
		2.12.2.12.1 .1.19.	- Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi teknis Perkantoran	Pembiayaan jasa PNS/Non PNS		1 thn	180,900,000	1 thn	198,990,000	1 thn	218,889,000	1 thn	240,777,900	1 thn	264,855,690			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%													
			Kegiatan :				1,365,625,275		1,502,187,803		1,652,406,583		1,817,647,241		1,999,411,965			
		2.12.2.12.0 1.02.22.	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Terehabnya Gedung Kantor		gedung kantor	1,200,000,000	gedung kantor	1,320,000,000	gedung kantor	1,452,000,000	gedung kantor	1,597,200,000	gedung kantor	1,756,920,000			
		2.12.2.12.0 1.02.23.	- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan		1 unit	40,625,000	1 unit	44,687,500	1 unit	49,156,250	1 unit	54,071,875	1 unit	59,479,063			
		2.12.2.12.0 1.02.24.	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional		3 roda 4, 3 roda 2	75,000,275	3 roda 4, 3 roda 2	82,500,303	3 roda 4, 3 roda 2	90,750,333	3 roda 4, 3 roda 2	99,825,366	3 roda 4, 3 roda 2	109,807,903			
		2.12.2.12.0 1.02.26.	- pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor		1 thn	50,000,000	1 thn	55,000,000	1 thn	60,500,000	1 thn	66,550,000	1 thn	73,205,000			
			2.12.2.12.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur													
			Kegiatan :				24,000,0		26,400,00		29,040,00		31,944,0		35,138,4			

						00		0		0		00		00				
		2.12.2.12.0 1.03.02	- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya.	Tersedianya kelengkapan atribut Aparatur sipil negara	100%	40 stel	24,000,000	40 stel	26,400,000	43 stel	29,040,000	43 stel	31,944,000	43 stel	35,138,400			
		2.12.2.12.0 1.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD														
			Kegiatan :			15,600,000		17,160,000		18,876,000		20,763,600		22,839,960				
		2.12.2.12.0 1.06.01.	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	lakip,renstra,lap keu,	1 thn	15,600,000	1 thn	17,160,000	1 thn	18,876,000	1 thn	20,763,600	1 thn	22,839,960			
		2.12.2.12.0 1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur														
			Kegiatan :			410,000,000		451,000,000		496,100,000		545,710,000		600,281,000				
		2.12.2.12.0 1.05.08.	- Implementasi peningkatan kualitas pelayanan publik (capacity Building)	Kualitas sumber daya aparatur	100%	pegawai DPM PTSP	410,000,000	pegawai DPM PTSP	451,000,000	pegawai DPM PTSP	496,100,000	pegawai DPM PTSP	545,710,000	pegawai DPM PTSP	600,281,000			
		4.02.2.12.01.23.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi														
			Kegiatan:			190,000,000												
		4.02.2.12.0 1.23.02.	- Penyediaan Media Informasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	Tersedianya media informasi perizinan dan penanaman modal	100%	Investor	190,000,000	Investor	209,000,000	Investor	229,900,000	Investor	252,890,000	Investor	278,179,000			
		4.02.2.12.01.24.	Program Mengintefikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Memantapkan penanganan pengaduan masyarakat														

			Kegiatan :				200,000,000		220,000,000		222,000,000		222,200,000		222,220,000			
		4.02.2.12.01.24.	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya penanagan pengaduan masyarakat	80%	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	222,000,000	100%	222,200,000	100%	222,220,000			
		4.02.2.12.01.32.	Program Peningkatan Pelayanan dan Perizinan Usaha	Survey terhadap izin usaha														
			Kegiatan :				190,000,000		209,000,000		229,900,000		252,890,000		278,179,000			
		4.02.2.12.01.32.01.	- Monitoring dan Evaluasi Perizinan (Survey Lapangan dan Perizinan Keliling)	Survey terhadap izin usaha	100%	1 thn	190,000,000	1 thn	209,000,000	1 thn	229,900,000	1 thn	252,890,000	1 thn	278,179,000			
		4.02.2.12.01.38.	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu	Meningkatnya sistem pelayanan terpadu														
			Kegiatan :				115,000,000		126,500,000		139,150,000		153,065,000		168,371,500			
		4.02.2.12.01.38.01.	- Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Terlaksananya Sosialisasi terhadap pelaku usaha dan aparatur kecamatan mengenai perizinan	100%	1 thn	115,000,000	1 thn	126,500,000	1 thn	139,150,000	1 thn	153,065,000	1 thn	168,371,500			
Meningkatnya daya saing dan iklim investasi	Meningkatnya Jumlah Investasi		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tercapainya iklim investasi dan Realisasi Investasi														
			Kegiatan :				180,000,000		198,000,000		217,800,000		239,580,000		263,538,000			
		2.12.1.16.01.16.01.	- Penyusunan Kebijakan Investasi bagi pembangunan fasilitas dan infrastruktur (RUPM)	Tersedianya Dokumen Rancangan Umum Penanaman	-	Dokumen	180,000,000	dokumen	198,000,000	dokumen	217,800,000	dokumen	239,580,000	dokumen	263,538,000			

				Modal (RUPM)														
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya Pameran investasi dalam dan luar daerah														
			Kegiatan :				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000			
		2.12.1.16.0.15.10.	- Penyelenggaraan Pameran Investasi (Expo) Luar Daerah	Terlaksananya pameran investasi luar daerah	100%	pameran/expo	160,000,000	pameran/expo	176,000,000	pameran/expo	193,600,000	pameran/expo	212,960,000	pameran/expo	234,256,000			
		2.12.1.16.0.15.10.	- Penyelenggaraan Pameran Investasi (Expo) Dalam Daerah	Terlaksananya pameran investasi dalam daerah		pameran/expo	40,000,000	pameran/expo	44,000,000	pameran/expo	48,400,000	pameran/expo	53,240,000	pameran/expo	58,564,000			

T.C.28
INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH BESAR

Nomor	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
			Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%												100%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Aceh Besar
				1,057,617,400		1,163,379,140		1,279,717,054		1,407,688,759		1,548,457,635				
	Tersedianya sarana komunikasi,air dan listrik		1 thn	103,224,000	1 thn	113,546,400	1 thn	124,901,040	1 thn	137,391,144	1 thn	151,130,258				
	Terbayarnya pajak kendaraan dinas dan operasional		1 thn	48,300,000	1 thn	53,130,000	1 thn	58,443,000	1 thn	64,287,300	1 thn	70,716,030				
	Tersedianya jasa kebersihan kantor		1 thn	6,000,000	1 thn	6,600,000	1 thn	7,260,000	1 thn	7,986,000	1 thn	8,784,600				
	Tersedianya ATK Kantor		atk	57,263,400	atk	62,989,740	atk	69,288,714	atk	76,217,585	atk	83,839,344				
	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor		1 thn	130,000,000	1 thn	143,000,000	1 thn	157,300,000	1 thn	173,030,000	1 thn	190,333,000				
	Tersedianya alat listrik dan elektronik		alat listrik	24,000,000	alat listrik	26,400,000	alat listrik	29,040,000	alat listrik	31,944,000	alat listrik	35,138,400				
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 thn	90,000,000	1 thn	99,000,000	1 thn	108,900,000	1 thn	119,790,000	1 thn	131,769,000				
	Tersedianya bahan bacaan		1 thn	2,400,000	1 thn	2,640,000	1 thn	2,904,000	1 thn	3,194,400	1 thn	3,513,840				
	Tersedianya makan minum karyawan kantor		1 thn	150,580,000	1 thn	165,638,000	1 thn	182,201,800	1 thn	200,421,980	1 thn	220,464,178				

	Tugas - tugas Kedinasan		1 thn	264,950,000	1 thn	291,445,000	1 thn	320,589,500	1 thn	352,648,450	1 thn	387,913,295			
	Pembiayaan jasa PNS/Non PNS		1 thn	180,900,000	1 thn	198,990,000	1 thn	218,889,000	1 thn	240,777,900	1 thn	264,855,690			
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%													
				1,365,625,275		1,502,187,803		1,652,406,583		1,817,647,241		1,999,411,965			
	Terehabnya Gedung Kantor		gedung kantor	1,200,000,000	gedung kantor	1,320,000,000	gedung kantor	1,452,000,000	gedung kantor	1,597,200,000	gedung kantor	1,756,920,000			
	Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan		1 unit	40,625,000	1 unit	44,687,500	1 unit	49,156,250	1 unit	54,071,875	1 unit	59,479,063			
	Terpeliharanya kendaraan operasional		3 roda 4, 3 roda 2	75,000,275	3 roda 4, 3 roda 2	82,500,303	3 roda 4, 3 roda 2	90,750,333	3 roda 4, 3 roda 2	99,825,366	3 roda 4, 3 roda 2	109,807,903			
	Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor		1 thn	50,000,000	1 thn	55,000,000	1 thn	60,500,000	1 thn	66,550,000	1 thn	73,205,000			
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur														
				24,000,000		26,400,000		29,040,000		31,944,000		35,138,400			
	Tersedianya kelengkapan atribut Aparatur sipil negara	100%	40 stel	24,000,000	40 stel	26,400,000	43 stel	29,040,000	43 stel	31,944,000	43 stel	35,138,400			
4	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD														
				15,600,000		17,160,000		18,876,000		20,763,600		22,839,960			
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	lakip,renstra,lap keu,	1 thn	15,600,000	1 thn	17,160,000	1 thn	18,876,000	1 thn	20,763,600	1 thn	22,839,960			
5	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur														
				410,000,000		451,000,000		496,100,000		545,710,000		600,281,000			
	Kualitas sumber daya aparatur	100%	pegawai DPM PTSP	410,000,000	pegawai DPM PTSP	451,000,000	pegawai DPM PTSP	496,100,000	pegawai DPM PTSP	545,710,000	pegawai DPM PTSP	600,281,000			

6	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi														
				190,000,000		209,000,000		229,900,000		252,890,000		278,179,000			
	Tersedianya media informasi perizinan dan penanaman modal	100%	Investor	190,000,000	Investor	209,000,000	Investor	229,900,000	Investor	252,890,000	Investor	278,179,000			
7	Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat														
				200,000,000		220,000,000		222,000,000		222,200,000		222,220,000			
	Terlaksananya penangan pengaduan masyarakat	80%	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	222,000,000	100%	222,200,000	100%	222,220,000			
8	Survey terhadap izin usaha														
				190,000,000		209,000,000		229,900,000		252,890,000		278,179,000			
	Survey terhadap izin usaha	100%	1 thn	190,000,000	1 thn	209,000,000	1 thn	229,900,000	1 thn	252,890,000	1 thn	278,179,000			
9	Meningkatnya sistem pelayanan terpadu														
				115,000,000		126,500,000		139,150,000		153,065,000		168,371,500			
	Terlaksananya Sosialisasi terhadap pelaku usaha dan aparatatur kecamatan mengenai perizinan	100%	1 thn	115,000,000	1 thn	126,500,000	1 thn	139,150,000	1 thn	153,065,000	1 thn	168,371,500			
10	Tercapainya iklim investasi dan Realisasi Investasi														
				180,000,000		198,000,000		217,800,000		239,580,000		263,538,000			
	Tersedianya Dokumen Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM)	-	Dokumen	180,000,000	dokumen	198,000,000	dokumen	217,800,000	dokumen	239,580,000	dokumen	263,538,000			
11	Terlaksananya Pameran investasi														

	dalam dan luar daerah														
				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000			
	Terlaksananya pameran investasi luar daerah	100%	pameran/expo	160,000,000	pameran/expo	176,000,000	pameran/expo	193,600,000	pameran/expo	212,960,000	pameran/expo	234,256,000			
	Terlaksananya pameran investasi dalam daerah		pameran/expo	40,000,000	pameran/expo	44,000,000	pameran/expo	48,400,000	pameran/expo	53,240,000	pameran/expo	58,564,000			